

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

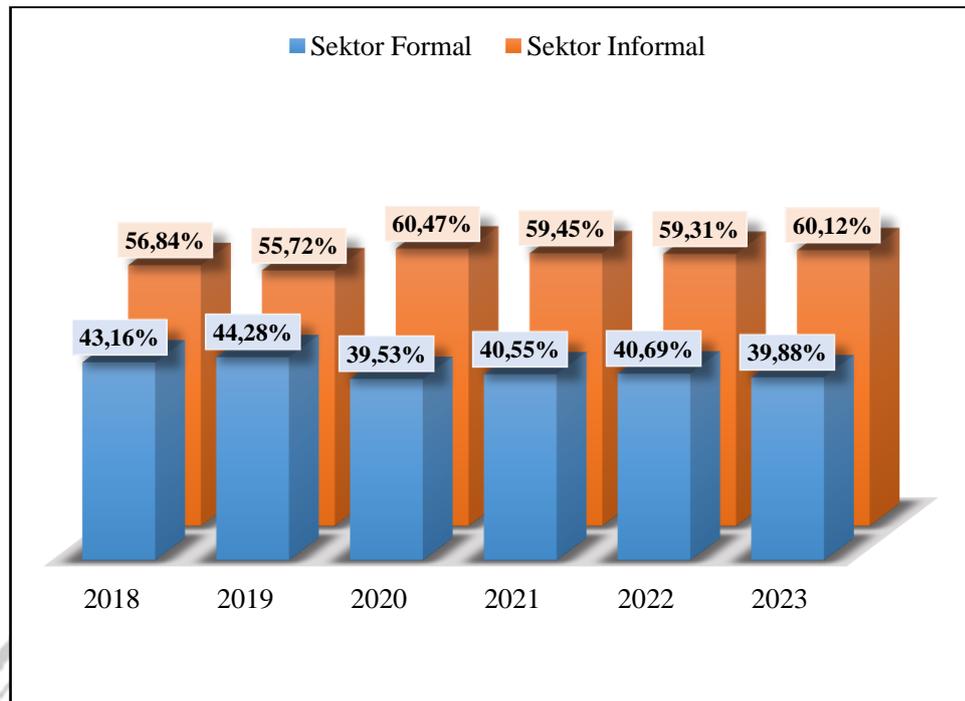
#### **A. Latar Belakang**

Negara berkembang seperti Indonesia menjalankan upaya pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membawa negara ini menuju era modernisasi (Arjuna, 2018). Salah satu fokus utama pembangunan saat ini adalah sektor ekonomi, dan kemajuan dalam hal ini dapat diukur melalui berbagai indikator pencapaian. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dianggap penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat secara proporsional. Aktivitas perekonomian masyarakat juga memiliki peran sentral dalam mencapai perkembangan ekonomi yang signifikan. Pentingnya perekonomian yang sehat juga tercermin dalam keterkaitannya dengan sektor informal dan sektor formal. Kedua sektor ini menjadi aspek penting dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana yang jelas diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan dan dukungan terhadap sektor informal dan formal merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memajukan Indonesia secara keseluruhan.

Sektor formal merujuk pada kegiatan usaha yang memiliki organisasi terstruktur, proses kerja yang teratur, serta pembiayaan yang bersumber dari lembaga resmi. Sektor ini juga menggunakan tenaga kerja dengan tingkat upah yang ditentukan. Di sisi lain, sektor informal memiliki bentuk usaha yang kurang terorganisasi, seringkali berupa usaha mandiri, dengan proses kerja yang tidak teratur. Modal kerja pada sektor informal umumnya dibiayai secara

independen atau melalui sumber-sumber yang tidak resmi, dan tenaga kerjanya seringkali berasal dari anggota keluarga (Jayadinata, 1999). Widyawati (2017) menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang, mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi. Dalam konteks ini, sektor ekonomi informal menjadi semakin penting sebagai penyerap tenaga kerja utama. Pertumbuhan penduduk yang pesat menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di Indonesia, menghasilkan berbagai masalah termasuk pengangguran, pendapatan per kapita yang rendah, dan ketidakmerataan tingkat pendapatan masyarakat (Pratiningsih, 2021). Sektor informal menjadi respons terhadap keterbatasan dalam penyediaan lapangan kerja formal.

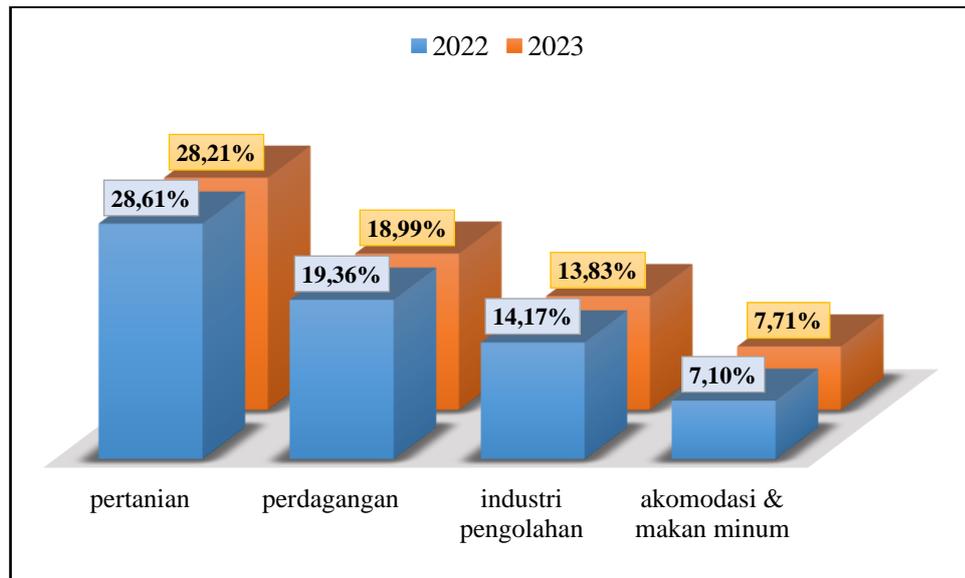
Keberadaan sektor informal menjadi pilar utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada distribusi barang dan jasa untuk menciptakan peluang kerja dan penghasilan, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun orang lain. Todaro (1998) menyebutkan bahwa sektor informal memiliki karakteristik yang sangat beragam, melibatkan kegiatan produksi barang dan jasa dalam skala kecil, unit produksi yang dimiliki oleh individu atau kelompok, menggunakan tenaga kerja secara intensif, menerapkan teknologi yang sederhana, dan pekerjanya cenderung tidak memiliki pendidikan formal serta keterampilan yang terbatas. Hal ini menyebabkan produktivitas dan pendapatan pada sektor informal cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sektor formal. Pendapatan bagi pekerja di sektor informal tidak bersifat tetap seperti upah bulanan pada sektor formal, seperti yang diatur oleh peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam sektor formal. Penghasilan pekerja informal tidak diatur oleh campur tangan pemerintah dan bersifat lebih fleksibel.



Sumber: BPS Kabupaten Sragen (2023)

**Gambar 1.1 Proporsi Pekerja Sektor Formal dan Informal di Indonesia Tahun 2018-2023**

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diamati bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2023, terjadi pergeseran yang signifikan dalam struktur pekerjaan di Indonesia. Pada tahun 2018, sektor formal menguasai 43,16% dari total pekerja, sementara sektor informal mencapai 56,84%. Namun, perlahan-lahan, sepanjang tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan proporsi pekerja informal. Pada tahun 2019, sektor formal meningkat tipis menjadi 44,28%, sementara sektor informal mengalami penurunan menjadi 55,72%. Namun, kecenderungan ini berubah pada tahun 2020, di mana sektor formal kembali mengalami penurunan menjadi 39,53%, sedangkan sektor informal meningkat tajam menjadi 60,47%. Meskipun terjadi fluktuasi kecil pada tahun 2021 dan 2022, namun pada tahun 2023, proporsi pekerja informal mencapai puncaknya dengan 60,12%, sedangkan sektor formal hanya mencapai 39,88%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pekerjaan informal memiliki kapasitas besar untuk menyerap tenaga kerja yang tidak dapat tertampung dalam sektor formal.



Sumber: BPS Kabupaten Sragen (2023)

**Gambar 1. 2 Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Indonesia**

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat bahwa sektor akomodasi & makanan minuman merupakan lapangan pekerjaan ketiga yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini terlihat pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2023 proporsi penyerapan tenaga kerja oleh sektor akomodasi & makanan minuman mencapai 7,71%, setara dengan 1,18 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, yang mencapai 7,10%. Data tersebut juga menyoroiti perbandingan proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor akomodasi & makanan minuman dengan sektor-sektor lainnya. Meskipun sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan memiliki proporsi yang lebih tinggi secara keseluruhan, sektor akomodasi & makanan minuman tetap menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Bank Indonesia (2015) dalam (Pranatasari & Wadyatenti, 2022) menyatakan bahwa pedagang kaki lima termasuk salah satu contoh pekerjaan yang bergerak pada sektor informal, khususnya dalam sektor akomodasi & makanan minuman.

Menurut Pratiwi et al. (2018), Pedagang Kaki Lima atau disebut juga PKL diartikan sebagai sektor informal yang ada di setiap kota yang menjual barang maupun jasa dan pada dasarnya tidak terdaftar oleh pemerintah daerah. PKL dianggap sebagai sektor yang fleksibel, artinya setiap masyarakat dari berbagai latar belakang (terutama dari latar belakang ekonomi rendah/kecil), anggaran yang relatif terbatas, sumber daya manusia yang rendah, dan tidak terampil dapat membangun warung makannya atau menjadi PKL. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan mengapa hal tersebut tidak bisa diatur oleh pemerintah di bidang perekonomian. Pedagang kaki lima sering kali dianggap mengganggu kegiatan sektor lain seperti kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota, serta fungsi prasarana dan fasilitas public sehingga harus dihilangkan. Namun di sisi lain, keberadaan PKL sangat membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, sumber penerimaan daerah, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, oleh karenanya usaha ini perlu dilindungi dan dibina (Aotama & Klavert, 2021).

Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah tidak lepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Kabupaten Sragen termasuk lokasi yang memiliki mobilitas yang tinggi karena terletak sepanjang jalur utama Solo - Surabaya. Lokasi ini menjadi salah satu potensi emas bagi pelaku usaha sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi pelaku usaha informal seperti berdagang karena potensi yang dimiliki Kabupaten Sragen dalam urusan perdagangan memang tinggi. Sebagaimana yang dikatakan Rusito bahwa perkembangan usaha pedagang kaki lima juga makin bertambah jumlahnya, sebab untuk memasuki sektor ini sangatlah mudah. Karena menjadi pedagang kaki lima tidaklah harus memiliki ketrampilan khusus atau lebih maupun berpendidikan tinggi (Rusito et al., 2013). Hal inilah yang menjadikan penduduk yang tidak terserap dalam sektor formal memilih menjadi pedagang kaki lima sebagai mata pencahariannya. Kegiatan sebagai usaha pedagang kaki lima ini tentunya dapat memberikan sumbangan pendapatan keluarga bagi penduduk di Kelurahan Sragen Kulon. Besarnya

sumbangan yang diberikan oleh seseorang tergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh.

Kelurahan Sragen Tengah merupakan tempat yang strategis untuk perkembangan usaha pedagang kaki lima, hal ini dikarenakan lokasinya yang berada di pusat kota Sragen. Keberadaan berbagai fasilitas umum seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum yang mudah diakses di sekitar kelurahan ini menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang ramai. Selain itu, keberadaan penduduk yang cukup padat juga menjadi potensi pasar yang besar bagi pedagang kaki lima, dengan peluang untuk menarik perhatian banyak pelanggan. Meskipun demikian, banyak area di Kelurahan Sragen Tengah yang telah diambil alih untuk kegiatan berjualan sehingga mengubah fungsi aslinya. Beberapa titik lokasi yang seharusnya tidak dijadikan sebagai area berjualan diantaranya Jalan Diponegoro, Stadion Taruna, dan SDN Mojo 58. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro menimbulkan masalah karena berlokasi tepat di samping rel kereta api dan menggunakan lahan yang sebenarnya bukan milik pemerintah Kabupaten, melainkan milik PT KAI. Kemudian, keberadaan PKL di Stadion Taruna telah menyebabkan stadion terlihat kumuh dan merusak tatanan kota karena digunakan untuk kegiatan yang tidak semestinya. Sementara itu, PKL yang berjualan di sekitar SDN Mojo 58 dianggap mengganggu fasilitas umum karena berjualan tepat di trotoar jalan, menyebabkan kemacetan, dan mengurangi kenyamanan warga sekitar.

Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemangku kebijakan di daerah telah melakukan penataan lokasi berjualan, meskipun hal ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Penyebab utamanya adalah lamanya para pedagang menempati tempat tersebut. Pemandahan lokasi berdagang menjadi suatu kekhawatiran karena adanya potensi penurunan jumlah penghasilan yang akan didapat oleh para pedagang. Meskipun keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, tetapi relokasi dianggap sebagai langkah yang perlu dilaksanakan demi merapikan tata ruang dan mengoptimalkan penggunaan lahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 7 tahun 2014, BAB 1 Pasal 1 No 14 menyatakan bahwa "Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah." Selain itu, Pasal 1 No 17 dalam peraturan yang sama menjelaskan bahwa "Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dengan dasar hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di beberapa titik di Kelurahan Sragen Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan dan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memastikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan dapat terpenuhi.

Taman Kartini merupakan shelter yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menjadi tempat relokasi pedagang dari Jalan Diponegoro, Stadion Taruna, dan SDN Mojo 58. Shelter ini resmi dibuka oleh pemerintah daerah pada bulan April 2021. Terletak tidak jauh dari lokasi awal para pedagang berjualan, Taman Kartini masih dianggap sebagai lokasi yang strategis karena berada di pusat kota. Hingga saat ini, sebanyak 116 pedagang telah berpindah dan menempati shelter ini, mewakili seluruh pedagang dari ketiga lokasi sebelumnya. Pemindahan PKL dari Jalan Diponegoro, Stadion Taruna, dan SDN Mojo 58 ke Taman Kartini diharapkan mampu memberikan dampak positif baik bagi pedagang maupun masyarakat di sekitar area Taman Kartini. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa kebijakan tersebut mungkin akan menimbulkan dampak negatif, terutama terkait perbedaan pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum dan setelah relokasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin et al. (2020) dan (Purnomo, 2017), yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan pedagang setelah dilakukan

kebijakan relokasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai tingkat pendapatan para pedagang kaki lima di Taman Kartini, dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan mereka.

Salah satu faktor terpenting yang memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan pedagang adalah modal. Setiaji & Fatuniah (2018) menegaskan bahwa modal merupakan unsur krusial yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Keputusan pemerintah untuk memindahkan para pedagang ke lokasi baru menuntut ketersediaan modal yang lebih besar guna mendukung pembangunan ulang usaha di tempat baru. Menurut Artini (2023), modal dapat diartikan sebagai uang yang belum digunakan dan disimpan untuk kemudian diinvestasikan. Peningkatan jumlah modal yang digunakan dianggap dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan semakin besar modal yang digunakan, semakin luas juga potensi pengembangan usaha yang baru dimulai. Oleh karena itu, keberadaan modal yang besar dianggap dapat menjadi penentu pendapatan, karena dapat memperluas cakupan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal yang digunakan, semakin tinggi pula potensi peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Artaman et al., 2015), Antara & Aswitari (2016), Setiaji & Fatuniah (2018), (Allam et al., 2019), (Yuniarti, 2019), (Kase, 2020), Inderianti et al. (2020), Hanum (2017), dan (Marhawati, 2020) menyatakan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Berbeda dengan temuan (Rosidi & Suparno, 2018) ditemukan bahwa keberadaan modal tidak berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.

Pendapatan pedagang kaki lima tidak hanya bergantung pada modal, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Salah satu faktor lainnya adalah lamanya usaha. Lama usaha para pedagang di Taman Kartini memiliki variasi yang signifikan. Besarnya pendapatan pedagang juga turut dipengaruhi oleh lamanya mereka telah berkecimpung dalam dunia usaha (Butarbutar et al.,

2017). Semakin lama seseorang menjalankan usaha, semakin besar kemungkinannya untuk mengetahui peluang-peluang yang ada dalam meningkatkan pendapatan. Mayoritas pedagang di Taman Kartini telah menjalankan usaha mereka selama belasan tahun, sementara beberapa di antaranya merupakan pedagang baru dengan pengalaman beberapa tahun. Perpindahan lokasi berjualan dihadapi dengan keluhan oleh sebagian pedagang, karena mereka kehilangan pelanggan tetap di lokasi lama dan harus beradaptasi kembali dengan pelanggan baru.

Situasi ini membuat sebagian pedagang kurang optimis untuk melanjutkan usaha di Taman Kartini, dikhawatirkan akan mengalami penurunan pendapatan. Meskipun demikian, pengalaman yang lebih banyak membantu pedagang memiliki jaringan relasi dan pelanggan yang lebih luas. Dengan kata lain, pendapatan pedagang sangat tergantung pada seberapa lama mereka telah mencurahkan waktu dan usaha untuk bekerja. Fenomena ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Artaman et al., 2015), (Antara & Aswitari, 2016), (Hanum, 2017), dan (Setiaji & Fatuniah, 2018), yang menyatakan bahwa lamanya usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Sementara itu, temuan berbeda dilakukan oleh Yuniarti (2019) dan Inderianti et al. (2020) menunjukkan bahwa lamanya usaha tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan adalah Pendidikan. Pendidikan merupakan upaya setiap individu untuk mengembangkan bakat, sikap, dan pola perilaku yang akan memengaruhi kehidupan mereka, baik dalam konteks organisasi maupun individual (Widi, 2011). Tingkat pendidikan seseorang berhubungan erat dengan kemampuan mereka dalam mengasimilasi pengetahuan dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam konteks pekerjaan. Berdasarkan teori Simanjuntak (2001), terdapat keterkaitan antara peningkatan pendapatan dan tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi produktivitas pedagang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan. Individu dengan

tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu mengembangkan strategi untuk menarik pembeli dan meningkatkan penjualan produk mereka.

Keberhasilan dalam bersaing dengan pedagang lain tergantung pada inovasi dan kemampuan untuk menawarkan produk yang menarik bagi pelanggan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan berinovasi dan, pada akhirnya, dapat memberikan dampak positif pada pendapatan. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang dapat berkembang menjadi lebih luas, lebih canggih, dan lebih kreatif, sehingga menjadi sumber inspirasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari & Dewi (2014), Suprapti (2018), dan Keiku et al. (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Allam et al. (2019) dan Yuniarti (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Faktor yang Berhubungan Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Taman Kartini, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Taman Kartini?
2. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Taman Kartini?
3. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Taman Kartini?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dibatasi pada variabel pendapatan pedagang kaki lima di Taman Kartini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal usaha, lama usaha, dan pendidikan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh modal usaha berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Taman Kartini.
2. Untuk menganalisis pengaruh lama usaha berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Taman Kartini.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Taman Kartini.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, yaitu:

1. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, referensi, serta tambahan informasi penulisan penelitian selanjutnya mengenai analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kaki lima dengan studi kasus di Taman Kartini, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran positif dalam rangka memberikan informasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sragen terkait pengembangan pedagang kaki lima di Taman Kartini.